BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang beradap dan memiliki sebuah aturan-aturan, baik yang mengatur hubungan dengan sesama manusia maupun yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhannya. Oleh sebab itu, proses penyelenggaraan regenerasi manusia harus diikuti aturan yang telah diperintahkan Allah dan manusia yang dibuat oleh lembaga perkawinan. Aturan dalam lembaga perkawinan merupakan sesuatu yang manusiawi karena manusia diikat kewajiban dan hak antara yang satu maupun dengan yang lainnya.¹

Dalam sebuah proses pendidikan manusia itu di mulai dari adanya sebuah keluarga. Keluarga adalah tempat utama dan pertama untuk dapat membentuk keluarga yang sehat dan bahagia. Mampu membimbing dan mengarahkan keluarganya menuju tujuan yang diharapkan. Dengan itu kita akan melakukan proses pendewasaan diri untuk menuju sebuah perkawinan dan salah satu wujud kebesaran Allah SWT bagi manusia adalah diciptakannya manusia laki-laki dan perempuan dengan berpasang-pasangan untuk saling melengkapi untuk melangsungkan sebuah ikatan perkawinan.

Di Indonesia sendiri telah dibentuk sebuah hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dalam Undang–Undang Nomor 1

¹ Helmawati, Pendidikan Keluarga : *Teoretis dan Praktis*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hal 13.

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di dalam pasal 1 ayat (1) perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.²

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menegaskan bahwa perkawinan sebagai suatu akad (ikatan lahir batin) yang kuat (*miitsaaqon gholiidhan*) antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, sebagai perwujudan mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan dalam rangka ibadah kepada_Nya.³ Perkawinan suatu akad ikatan lahir batin yang kuat *miitsaaqon gholiidhan* adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak (calon suami isteri) sebagai pasangan yang akan melakukan perkawinan tanpa ada keraguan sedikitpun yang membuat perkawinan itu tidak kuat atau kokoh. Dalam hukum islam mendefinisikan dengan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta membatasi antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan mukhrim. Pernikahan atau

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal 1.

³ Mawardi Muzamil, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan DalamPerkembangannya dalam Kompilasi Hukum Islam*, Unissula Press, 2006, hal 1.

perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebijakan dan saling menyantuni keadaan seperti ini lazim disebut sakinah.⁴ Ibnu Majah juga meriwayatkan bahwa ‘Aisyah berkata: Rasulullah Saw. bersabda,

يَوْمَ الْأَمَمِ بِكُمْ مَكَائِرُ فَإِنِّي وَتَرَوُجُوا مِنِّي، فَلَيْسَ بِسُنَّتِي يَعْمَلُ لَمْ وَمَنْ سُنَّتِي مِنْ لِنِكَاحِ
الْقِيَامَةِ

“Nikah adalah sunnahku, dan barang siapa yang tidak mau mengamalkan sunahku berarti bukan bagian dariku. Menikahlah, karena sesungguhnya aku akan bangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat.”⁵

Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam diatas mempunyai tujuan yang sama dari perkawinan, yaitu perkawinan didefinisikan untuk mewujudkan atau membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi supaya masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spriritual dan materiil. Adapun undang-undang yang mengatur secara lengkap tentang syarat-syarat dan rukun perkawinan yang terdiri dari : Siqhat (akad) ijab-qabul, wali, 2 orang saksi.

⁴ Sudarsono, *Op. Cit.*, hal 2.

⁵ https://sepdhani.wordpress.com/2014/09/05/seri-mendidik-anak-bersama-nabi-mabn_05/#more-1270 diakses pada Kamis, tanggal 12 Oktober 2017, pukul 10.39 WIB.

Dimana sebuah syarat-syarat dan rukun nikah itu sangat di perlukan dalam sebuah perkawinan untuk dapat melangsungkan perkawinan, tanpa adanya syarat-syarat dan rukun yang menjadi aturan dalam perkawinan itu maka perkawinan dapat dibatalkan. Definisi dari pembatalan perkawinan itu sendiri adalah suatu pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akan nikah. Karena itu akan dikaji ulang mengenai langkah-langkah pembatalan setelah perkawinan selesai dilangsungkan, dan diketahui adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi menurut Pasal 22 Undang-Undang Perkawinann Tahun 1974. Namun, apabila rukun yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya dapat dikatakan tidak sah.

Di dalam fikih sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda tetapi hukumnya sama yaitu nikah al-fasid dan nikah al-batil. Al-jaziry menyatakan bahwa nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya yang telah ditentukan, sedangkan nikah al-batil adalah apabila tidak terpenuhi rukunnya. Hukum dari nikah al-Fasid dan al-batil adalah sama-sama tidak sah. Dalam terminologi undang-undang perkawinan nikah *al-fasid* dan *al-batil* dapat digunakan untuk meembatalan perkawinan dan bukan untuk pencegahan.⁶

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan. Barang siapa yang perkawinan masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan permohonan pembatalan

⁶<https://darmansyahteknisicomp.wordpress.com/2012/04/06/pembatalan-perkawinan/> diakses pada Kamis, tanggal 12 Oktober 2017, pukul 10.49 WIB.

perkawinan. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana sebuah perkawinan dilangsungkan atau dapat di tempat tinggal suami-isteri.

Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh para keluarga dalam garis besar keturunan lurus ke atas dari suami dan isteri, keduanya berhak untuk dibatalkan berdasarkan alasan di dalam ayat (1) Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dikatakan gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai pasangan suami-isteri dan dapat memperlihatkan akte dari perkawinan yang dibuat pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya perkawinan itu sah.

Di dalam permohonan pembatalan perkawinan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Dengan adanya pembatalan perkawinan itu, merupakan di dalam permohonan pembatalan tidak adanya fungsi pengawasan baik dari pihak keluarga maupun pejabat berwenang sehingga perkawinan terlanjur terlaksana. Ternyata setelah pembatalan berlangsung ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Pasal 24 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa : barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan juga dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurani ketentuan Pasal 3 dan 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.⁷

Di dalam undang-undang perkawinan diatur untuk tempat dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang dimuat dalam Pasal 25 Undang-Undang Perkawinan yaitu yang berisi tentang permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat di tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tentang perkawinan mengatur lebih lanjut mengenai beberapa masalah yang berkaitan erat dengan adanya pembatalan perkawinan. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 37 yang menjelaskan uraian mengenai bahwa suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh lebih baik terhadap suami maupun isteri terhadap keluarganya, ketentuan ini dapat dimaksudkan untuk dapat menghindari terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain diluar pengadilan.

⁷ Sudarsono, *Op. Cit.* hal 294.

Adapun suatu perbuatan-perbuatan yang menyangkut permohonan akan dibatalkan dan suatu perkawinan akan diatur dengan lengkap di dalam Pasal-Pasal yang telah diaturnya. Berdasarkan dari penjelasan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud dan tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dijelaskan dalam bentuk kripsi dengan judul “ **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR : 2004/Pdt.G/2017/PA.Smg)** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah latar belakang tersebut, maka permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Apakah yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan ?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul bagi suami istri dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang ?⁸

⁸ Rujukan dari skripsi Lincah Marta Aji pada tanggal 20 Januari 2018 Pukul 09.30 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul bagi suami istri dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan mempunyai manfaat, baik dalam segi teoritis maupun segi praktis adalah sebagai berikut :

a. Segi teoritis

Sebagai bahan untuk menambah wawasan keilmuan dibidang ilmu hukum bagi para akademisi umumnya dalam dunia pendidikan, khususnya dibidang hukum perdata kaitannya dengan putusan hakim dalam pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.

b. Segi Praktis

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum di Indonesia supaya dapat melakukan pengembangan bagi pihak-pihak yang terkait sehingga mampu menjawab segala problematika sosial yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya dalam hukum perdata.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah suatu sarana pokok dalam sebuah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian hukum bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Di dalam setiap penelitian hukum, metode penelitiannya selalu menguraikan penalarannya maupun dalil-dalilnya. Untuk itu dalam penelitian ini digunakan metode-metode tertentu agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

1. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang diteliti oleh penulis maka dalam hal ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang secara mendalam dilakukan terhadap kenyataan yang nyata dalam masyarakat atau di lingkungan sekitar dengan maksud dan tujuan menemukan sebuah fakta yang ada (*fact-finding*), yang kemudian membahas tentang permasalahan-permasalahan dan terakhir menuju kepada penyelesaian masalah..

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah dengan *deskriptif analisis*. Penelitian *deskriptif analisis* adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran sejelas mungkin mengenai pembatalan perkawinan, pertimbangan hakim, akibat hukum pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan dalam studi kasusnya di Pengadilan Agama Semarang di Jalan Jendral Urip Sumoharjo No.05, Karanganyar, Ngaliyan, Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244.

4. Metode Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder :

a) Data Primer

Data primer adalah bukti data penulisan yang diperoleh di lapangan yang dilakukan secara langsung oleh penulisnya.⁹ Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Semarang M.Syukri yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada, yaitu dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu oleh penulis kepada substansi terkait yaitu di Pengadilan Agama Semarang, akan tetapi ada perbedaan pertanyaan yang di sesuaikan dengan situasi dan kondisi ketika sedang berwawancara secara langsung.

b) Data Sekunder

Data yang diperlukan untuk melengkapi dan mendukung data primer. Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh penulis dari sumber bacaan dan kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku referensi, artikel jurnal, makalah-

⁹ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 11.

makalah, laporan penelitian, dokumen, arsip dan artikel-artikel internet.

Data sekunder tersebut dibagi dalam tiga bahan hukum :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan adalah peraturan Perundang-Undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian artikel ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder biasanya digunakan untuk memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu data

yang diperoleh dan disusun secara sistematis sehingga akan memperoleh data yang deskriptif. Data yang melukiskan obyek atau sebuah peristiwa yang terjadi dengan tujuan mendapatkan suatu penjelasan tentang dasar putusan hakim mengenai pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi untuk membantu mempermudah dalam memahami isi penelitian. Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini diuraikan tentang tinjauan pustaka yang meliputi pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, hak dan kewajiban perkawinan, pengertian pembatalan perkawinan, sebab-sebab pembatalan perkawinan, pihak-pihak yang berhak membatalkan perkawinan, akibat hukum dalam pembatalan perkawinan, tata cara pembatalan perkawinan.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas dari rumusan masalah yaitu mengenai bagaimana yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan dan bagaimana akibat hukum yang timbul bagi suami istri dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang.

Bab IV : Penutup

Pada bab terakhir berisikan daftar pustaka dan lampiran.